

Data Development of Tanjung Gadang Toward a Digital Village Project

Yenni Kurniawati^{*1}, Admi Salma¹, Dina Fitria¹, Riri Jonuarti¹

¹ Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar, Kota Padang, 25131, Indonesia

*Correspondence: yennikurniawati@fmipa.unp.ac.id

Diterima 4 September 2023 Disetujui 23 November 2023 Dipublikasikan 30 November 2023

Abstract – Developing villages' data toward digital data is one of villages' government programs to improve the villages. The village's government needs collaboration with professional surveyors and data digital builders to achieve the goal, which the government is unable to provide. The Statistics Department provided the team to overcome the problems by giving training surveys to local residents and accompanying them to build Nagari Tanjung Gadang digital data.

Keywords — digital data, Nagari Tanjung Gadang, survey, training

Pendahuluan

Data penduduk merupakan serangkaian informasi yang berkaitan dengan masyarakat di suatu wilayah. Data ini dapat berupa informasi pribadi, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan lainnya, sementara desa dianggap sebagai sumber data paling akurat untuk pencarian data penduduk [1]. Data desa dibutuhkan sebagai salah satu komponen penting dalam membuat kebijakan dan menjadi acuan dalam pengembangan desa. Desa yang diatur pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di lingkungan Provinsi Sumatera Barat dinyatakan sebagai nagari. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan di nagari diatur merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Dalam Pemerintahan Nagari.

Dewasa ini, pembangunan teknologi semakin pesat, tuntutan akan kebutuhan data yang mudah diakses, efektif dan akurat juga semakin meningkat, khususnya di sektor pemerintahan desa. Perkembangan teknologi saat ini juga membuka kemungkinan untuk mengubah data yang awalnya hanya tersimpan dalam bentuk *paper based* menjadi data digital, sehingga mampu memenuhi

tuntutan zaman akan kebutuhan data yang aksesibel dan akurat.

Hal ini juga sejalan dengan Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RJPM) Nagari Tanjung Gadang, Sijunjung [2]. Nagari ini berkomitmen memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan pendigitalisasian data menjadi salah satu langkah yang harus diambil. Digitalisasi sendiri dapat dianggap sebagai solusi dan upaya mengubah sistem pelayanan manual/konvensional menjadi lebih cepat [3]

Kendala yang dihadapi saat ini adalah belum terdigitalisasinya data nagari yang telah tersedia sehingga data itu hanya menjadi arsip di kantor wali nagari sebagaimana halnya yang terjadi di nagari Tanjung Balik [4], [5]. Hal ini tentu akan berdampak pada pelayanan yang kurang cepat dari pemerintah desa atau nagari, karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengaksesnya.

Nagari Tanjung Gadang merupakan salah satu nagari/desa yang sadar akan pentingnya data. Hal ini ditunjukkan dengan terpilihnya daerah ini sebagai salah satu nagari cinta statistik yang dicanangkan Dinas Komunikasi dan Informasi Teknologi Provinsi Sumatera Barat. Namun, hingga saat ini, nagari tersebut baru memiliki data terkait dengan masyarakat, tetapi belum mutakhir karena

adanya beberapa penduduk yang sudah tidak menetap. Selain itu, data tersebut juga belum terdigitalisasi dengan baik.

Kurangnya tenaga ahli dalam bidang survey dan digitalisasi data menjadi kendala utama saat ini. Dari permasalahan tersebut, maka ditawarkan bantuan pemutakhiran data oleh surveyor yang berpengalaman dan pendampingan dalam membuat data nagari Tanjung Gadang menjadi Desa Digital. Tujuannya adalah agar semua data nagari dapat di-*upgrade* dan didigitalisasikan secara bertahap hingga tercapainya data digital desa.

Solusi/Teknologi

Terdapat dua solusi yang ditawarkan untuk permasalahan yang dihadapi Nagari Tanjung Gadang. Pertama, terkait permasalahan pemutakhiran data. Nagari Tanjung Gadang sendiri tidak memiliki tenaga survey terampil yang memadai untuk melakukan pemutakhiran data. Luas dan kontur daerah juga membuat proses pemutakhiran memakan waktu lama.

Solusi yang ditawarkan dari permasalahan ini adalah menyediakan tenaga surveyor terampil, yaitu mahasiswa yang sudah terlatih dari Departemen Statistika. Mahasiswa telah dibekali dengan ilmu survey, akan berdampingan dengan perwakilan nagari guna melakukan pemutakhiran data. Kesulitan mahasiswa seperti tidak mengetahui lokasi responden akan terbantu oleh perwakilan nagari yang mendampinginya. Sementara perwakilan nagari akan mendapatkan pelatihan, pembekalan dan pengalaman survey.

Kendala kedua adalah tidak adanya tenaga ahli dalam pendigitalisasian data. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan pendampingan dalam mendigitalisasikan data nagari Tanjung Gadang. Digitalisasi dilakukan dengan menggunakan website dalam pendokumentasian hasil survey. Secara bertahap, semua data nagari yang telah

tersedia ataupun yang perlu pemutakhiran dapat diinput pada database digital ini, sehingga lebih aksesibel.

Hasil dan Diskusi

Program digitalisasi data Nagari Tanjung Gadang melibatkan 9 jorong, yaitu Koto Ranah, Koto Baru, Guguk Naneh, Pandar, Timbulun Patah, Sungai Napar, Mudik Malih, Pasar Tanjung Gadang dan Kayu Gadih. Tim pengabdian merancang terlebih dahulu instrumen survey berupa kuesioner pendataan jorong dan kuesioner pendataan rumah tangga. Kuesioner pendataan jorong telah diterbitkan hak kekayaan intelektualnya yang tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan nomor pencatatan 000530433 tertanggal 20 Oktober 2023.

Selanjutnya, untuk mensinergikan ilmu teknis yang diperoleh mahasiswa surveyor di kelas dan ilmu praktis di lapangan, dilakukan pelatihan tenaga survei. Pelatihan pertama adalah penjelasan mengenai kuesioner fisik dan teknis pengambilan datanya di lapangan. Sedangkan pelatihan kedua berkaitan dengan penggunaan website dan aplikasi pendukung pencatatan data seperti google earth dan GPS Map Camera.



Gambar 1. Pelatihan Surveyor: (atas) Penjelasan Teknis Pengambilan Data, (bawah) Penjelasan Penggunaan Website

Hal lain yang juga dibahas pada sesi pelatihan surveyor adalah penanganan kendala-kendala yang sekiranya akan muncul di lapangan. Demikian pula dilakukan uji coba website.

Dalam rangka pencapaian tujuan pemutakhiran dan digitalisasi data, mahasiswa surveyor turun ke lapangan dengan didampingi tim PkM. Kegiatan diawali dengan *focus group discussion* (FGD) membahas permasalahan yang dihadapi terkait data, kondisi dan kontur wilayah, dan solusi yang ditawarkan oleh tim PkM.

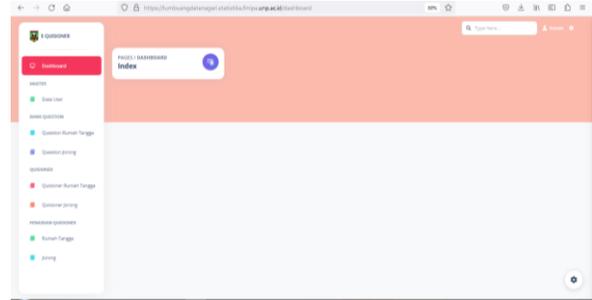
Pelaksanaan survey ke Nagari Tanjung Gadang dilakukan pada 22-24 Agustus 2023. Tim disambut baik oleh pihak nagari. Pada kesempatan ini, dilakukan kembali pembekalan dan pelatihan terkait sampling dan survei kepada tim surveyor dari mahasiswa, para wali jorong yang ada di selingkungan Nagari Tanjung Gadang, dan Perangkat Nagari Tanjung sebagai perwakilan nagari. Tujuannya adalah untuk memberikan pelatihan dan pembekalan survey khususnya bagi perangkat dan perwakilan nagari dan jorong.



Gambar 2. Pelatihan dan Pembekalan Surveyor di Nagari Tanjung Gadang

Kegiatan pembekalan dan pelatihan survey ini pada dasarnya dilakukan menggunakan website. Namun berdasarkan informasi dari pihak nagari, terdapat beberapa *blind spot* sehingga, paper based

kuesioner digunakan sebagai alternatif. Website yang digunakan adalah <https://lumbuangdatanagari.statistika.fmipa.unp.ac.id/> sebagaimana yang disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Laman website lumbuang data nagari

Setelah dilakukan pelatihan dan pembekalan, para surveyor diturunkan ke lapangan untuk mengaplikasikan ilmunya. Para surveyor di masing-masing jorong mendatangi rumah tangga yang terpilih sebagai sampel dan melakukan pengumpulan data.



Gambar 3. Cuplikan Beberapa Surveyor dan responden

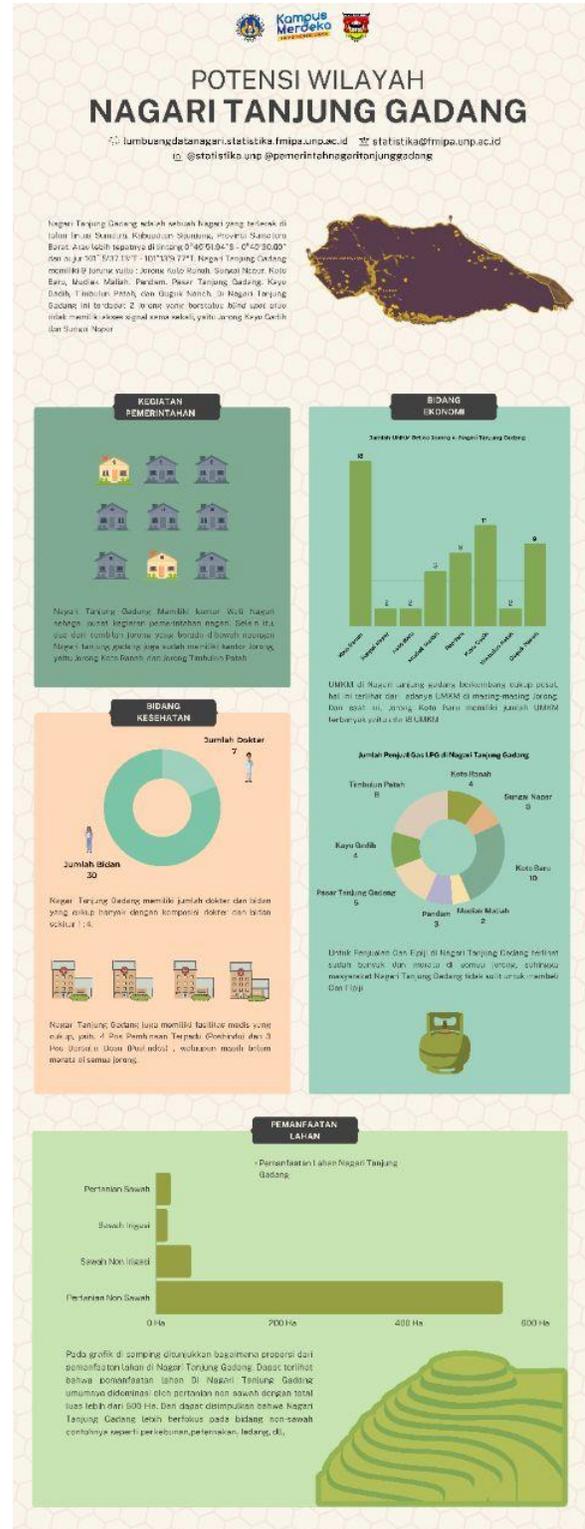
Beberapa kendala yang dihadapi surveyor antara lain ketidakstabilan internet sehingga paper based survey menjadi warna dari kegiatan ini. Karena itu, surveyor harus bekerja dua kali, mensurvey secara manual dan menginputkan kembali data yang diperoleh ke website. Kendala lain adalah tidak ditemukan responden yang diharapkan sesuai perhitungan sampling yang telah dilakukan mengikuti aturan sampling berpeluang. Namun, pihak nagari proaktif membantu menemukan identitas responden ataupun menjelaskan lokasi yang dimaksud sebagaimana yang disajikan Gambar 4.



Gambar 4. Diskusi Surveyor dengan Pihak Nagari

Data yang telah diperoleh dari responden diinputkan ke dalam website. Jika ditemukan kendala jaringan internet, maka hasil dari responden dicatat menggunakan kuesioner *paper based*. Hasil survei tersebut sudah dapat diakses pihak terkait untuk pengambilan data terkait survei yang telah dilakukan.

Hasil yang diperoleh disajikan dalam bentuk infografis. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Infografis Data Jorong

Kesimpulan

Dari kegiatan digitalisasi data Nagari Tanjung Gadang, Sijunjung dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memerlukan kerjasama antar pihak pelaksana dan pihak nagari. Pendampingan terhadap surveyor dari pihak mahasiswa sangat dibutuhkan karena kendala akses di beberapa titik, sehingga pemutakhiran data pendigitalisasian data dapat terlaksana dengan baik dan berkembar secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih LPPM Universitas Negeri Padang yang telah mendukung dan mendanai Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Pustaka

[1]Lailiyah K. Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *RISTEK*. 2022 ; 6(2) : 26-34

- [2]Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sijunjung tahun 2021-2026
- [3] Buchari, R.A. Implementasi EService pada Organisasi Publik di Bidang Pelayanan Publik di Kelurahan Cibakong Kecamatan Batunaggal kota bandung. *Sosial Humaniora*. 2016 ;18(3) : 1-9
- [4] Fitria D, Amalita N, Syafriandi S, Zilrahmi Z, Salma A, Vionanda D, Kurniawati Y. Survey Training for Collecting Data of Nagari Tanjung Balik. 2023 Apr 1; 6(1): 18-21.
- [5] Syafriandi, S., Amalita, N., Vionanda, D., Fitria, D., Zilrahmi, Z., & Yarman, Y. (2022). Nagari Tanjung Balik Menuju Digitalisasi Data. *Suluh Bendang: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(3), 607-613.
- [6] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- [7] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Dalam Pemerintahan Nagari